

SKRIPSI
PRAKTIK JUAL BELI OBAT KERAS TANPA RESEP DOKTER DI KOTA
PADANG DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28
TAHUN 2024 TENTANG PERATURAN PELAKSANA UNDANG-UNDANG
NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN

Diajukan sebagai syarat untuk memenuhi gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum
Universitas Andalas

OLEH:

NUR AIN LUBIS

2110111016

Program Kekhususan: Hukum Bisnis (PK II)

Pembimbing I : Dr. Misnar Syam, S.H., M. Hum.

Pembimbing II: Shafira Hijrya, S.H., M.H



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

2025

No. Reg. 41/PK-II/IV/2025



No. Alumni Universitas		Nur Ain Lubis	No. Alumni Fakultas	
a. Tempat/Tgl Lahir	:	Padang/ 14 April 2003	f. Tanggal Lulus	: 27 Agustus 2025
b. Nama Orangtua	:	Abdul Salam, Yulida	g. Predikat Lulus	: Dengan Pujian
c. Fakultas	:	Hukum	h. Lama Studi	: 4 Tahun
d. PK	:	Hukum Bisnis	i. IPK	: 3,92
e. No. BP	:	2110111016	j. Alamat	: Batu Gadang, Kel. Batu Gadang,, Kec. Lubuk Kilangan, Kota Padang

**PRAKTIK JUAL BELI OBAT KERAS TANPA RESEP DOKTER DI KOTA PADANG
DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2024 TENTANG
PERATURAN PELAKSANA UNDANGAN-UNDANGAN NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG KESEHATAN**

(Nur Ain Lubis, 2110111016, Fak. Hukum Universitas Andalas, 68 Hlm, 2025)

ABSTRAK

Penjualan obat keras tanpa resep dokter merupakan pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Kesehatan, yang secara tegas menyatakan bahwa obat keras hanya dapat diperoleh dengan resep dari dokter. Pada praktik dilapangan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara regulasi dengan kenyataan, dimana masyarakat dapat dengan mudah memperoleh obat keras di sarana pelayanan kefarmasian tanpa melalui diagnosis medis yang jelas. Kondisi ini menimbulkan potensi risiko terhadap keselamatan pasien, terutama ketika tidak disertai dengan informasi yang memadai dari apoteker. Perumusan masalah adalah 1) Bagaimana peran Dinas Kesehatan Kota Padang dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap praktik jual beli obat keras tanpa resep dokter di Kota Padang; 2) Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Kota Padang dalam mencegah transaksi jual beli obat keras tanpa resep dokter. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Padang dan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) terhadap praktik penjualan obat keras tanpa resep dokter. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif. Menggunakan data primer melalui wawancara dengan instansi terkait dan apoteker, serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan yang relevan. Dari hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan; 1) Dinkes telah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap apotek dan toko obat akan tetapi pengawasan dan pembinaan tersebut belum efektif; 2) BBPOM Kota Padang juga telah melakukan upaya untuk mencegah transaksi obat keras dengan melakukan pengawasan terhadap apotek dan toko obat serta juga telah melakukan pembinaan secara berkala kepada apoteker, tenaga kerja kefarmasian serta masyarakat, meskipun pengawasan telah dilakukan secara rutin, fokus pengawasan masih bersifat umum dan belum menyentuh secara khusus pada aspek distribusi obat keras. Untuk mewujudkan kepatuhan terhadap hukum kesehatan dan perlindungan konsumen, diperlukan penguatan strategi pengawasan serta pembinaan yang lebih kontekstual dan menyentuh akar permasalahan di masyarakat.

Kata Kunci: Obat Keras Tanpa Resep Dokter, Dinas Kesehatan, BBPOM

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada 27 Agustus 2025.

Penguji

Tanda Tangan	Penguji I	Penguji II
Nama Terang	Prof. Zefirzal Nurdin, S.H., M.Hum	Daswirman, S.H., M.H.

Mengetahui:

Ketua Departemen Hukum Perdata: **Dr. Devianty Fitri, S.H., M.Hum.**

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas	Nama: Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas	Nama: Tanda Tangan:



No. Alumni Universitas

Nur Ain Lubis

No. Alumni Fakultas

a. Place/Date Of Birth : Padang/ 14th April 2003
b. Parents' Name : Abdul Salam, Yulida
c. Faculty : Law
d. Concentration : Bussines Law
e. Student ID : 2110111016

f. Graduation Date : 27th
August 2025
g. Pass Predicate : Cumlaude
h. Lama Studi : 4 years
i. GPA : 3, 92
j. Address : Batu
Gadang,, Kel. Batu Gadang,
Kec.Lubuk Kilangan, Kota
Padang

The Practice of Selling Prescription-Only Medicines Without a Doctor's Prescription in Padang City Reviewed from Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
(Nur Ain Lubis, 2110111016, Faculty of Law, Andalas University, 68 Pages, 2025)

ABSTRACT

The sale of prescription-only medicines without a doctor's prescription constitutes a violation of the provisions stipulated in Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Kesehatan, which explicitly states that such medicines may only be obtained with a doctor's prescription. In practice, however, there is a discrepancy between the regulation and the reality, where people can easily obtain prescription-only medicines from pharmaceutical service facilities without undergoing a proper medical diagnosis. This condition poses potential risks to patient safety, particularly when not accompanied by adequate information from pharmacists or pharmaceutical personnel regarding the proper use of the medicines. The formulation of the problems is: (1) How is the role of Dinas Kesehatan Kota Padang in supervising and guiding the practice of selling prescription-only medicines without a doctor's prescription in Padang City; (2) What efforts are carried out by Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan in Padang to prevent the sale of prescription-only medicines without a doctor's prescription. This study aims to analyze the role and effectiveness of supervision conducted by Dinas Kesehatan Kota Padang and Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) over the sale of prescription-only medicines without a doctor's prescription. The research method employed is empirical juridical with a qualitative and descriptive approach. Primary data were obtained through interviews with related institutions and pharmacists, while secondary data were collected from relevant laws and regulations. The results and discussion lead to the following conclusions: (1) Dinas Kesehatan has carried out supervision and guidance toward pharmacies and drug stores, but such supervision and guidance have not been effective; (2) Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) in Padang has also made efforts to prevent prescription-only medicine transactions by supervising pharmacies and drug stores as well as conducting regular training for pharmacists, pharmaceutical personnel, and the general public to improve knowledge regarding the acquisition and use of such medicines. Although supervision has been conducted routinely, its focus remains general and has not specifically addressed the distribution of prescription-only medicines. To achieve compliance with health law and consumer protection, it is necessary to strengthen supervision strategies and provide guidance that is more contextual and addresses the root problems in society.

Keywords: Prescription-Only Medicines, Dinas Kesehatan, BBPOM.

This minor thesis has been successfully defended and regarded to graduate by August 27th, 2025.

Examiner,

Signature

Examiner I

Examiner II

Name

Prof. Zefirzal Nurdin, S.H., M.Hum

Daswirman, S.H., M.H.

Acquainted,

Head of the Department of State Civil Law: Dr.Devianty Fitri, S.H.,M.Hum

Signature

Alumnus has been registered in the Faculty/University under the number:

Faculty/University Officer	
No. Alumni Faculty	Name: Signature:
No. Alumni University	Name: Signature: